

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) 2011-2016 DI DESA HARAPAN JAYA
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Lailan Rahmadhini
NPM : 137310098

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M. C. L. Selaku Rektor Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosial & politik UIR.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S. Sos., M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

3. Bapak Dr. H. Syafhendry, M. Si selaku pembimbing I yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
4. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S. IP., M. Si selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan usulan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

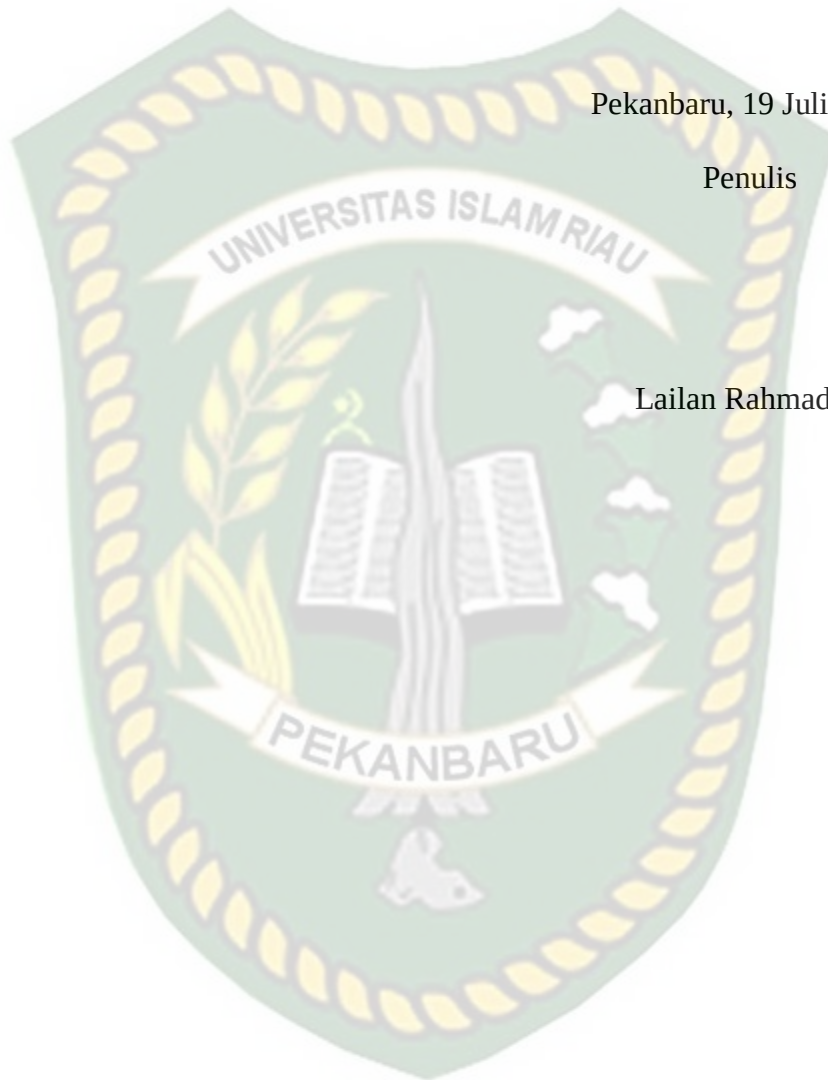
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 19 Juli 2019

Penulis

Lailan Rahmadini



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
a. Tujuan Penelitian.....	11
b. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Manajemen Pemerintahan	15
3. Konsep Evaluasi	18

4. Teori Kebijakan.....	21
5. Evaluasi Kebijakan.....	26
6. Konsep Perencanaan.....	30
7. Teori Pembangunan.....	33
8. RPJMDes(Pembangunan Jangka Menengah Desa)...	36
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Hipotesis	40
E. Konsep Operasional.....	41
F. Teknik Pengukuran.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Penarikan sampel	49
E. Jenis dan Sumber data.....	49
F. Teknik Pengumpulan data.....	50
G. Teknik Analisis data.....	51
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	52
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pelalawan.....	51

B. Profil Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	56
C. Kependudukan.....	61

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	66
B. Efektivitas.....	67
C. Efisiensi.....	72
D. Kecukupan.....	77
E. Pemerataan.....	82
F. Responsivitas.....	87
G. Ketepatan.....	92
H. Rekapitulasi Responden.....	99
I. Faktor Dan Kendala Evaluasi pembangunan.....	100

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	105

DAFTAR KEPUSTAKAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailan Rahmadhini
NPM : 137310098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juli 2019

Pelaku Pernyataan



Lailan Rahmadhini

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) 2011-2016 DI DESA HARAPAN JAYA
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh :

Lailan Rahmadhini

ABSTRAK

Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Supaya lebih baik, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, pelayanan merupakan suatu proses kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan secara optimal mungkin kepada pihak lain yang memerlukan baik diminta maupun tidak diminta. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun yang di Evaluasi adalah Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sehubungan dengan itu melalui Teori William N Dunn (2003:608), maka indikatornya ada 6 untuk mengukur penilaian tersebut yaitu Efektivitas, Efisiensi, Pemerataan, Kecukupan, Responsivitas, dan Ketepatan, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam, dengan tipe Penelitian yaitu deskriptif secara kuantitatif, maka peneliti memperoleh hasil penelitian Cukup Baik

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan.

**EVALUATION OF POLICY DESA MEDIUM-TERM DEVELOPMENT
PLAN (RPJMDes) 2011-2016 IN DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN
PANGKALAN KURAS PELALAWAN DISTRICT**

By:

Lailan Rahmadhini

ABSTRACT

Evaluation is the process of measuring and comparing the results of work which in fact is achieved with the results that should be achieved. Meanwhile the existence of evaluation is something very important to know the extent to which success can be achieved when a policy is implemented. To be better, public policy is a decision made by the State, especially the government, as a strategy to realize the objectives of the country concerned, service is a process of activities of a person or group of people to provide optimal assistance to other parties who require both requested and unsolicited. Development aims to improve the welfare of the village community and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the fulfillment of basic needs, development of village facilities and infrastructure, development of local economic potential, and sustainable use of natural and environmental resources. The evaluation is the 2011-2016 Village Medium Term Development Plan (RPJMDES) Policy Evaluation in Harapan Jaya Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. In connection with that through William N Dunn's Theory (2003: 608), there are 6 indicators to measure those assessments namely Effectiveness, Efficiency, Equity, Adequacy, Responsiveness, and Accuracy, with the research location in Lubuk Dalam Subdistrict, with the type of Research that is descriptive quantitatively, the researcher obtained the results of the study quite well.

Keywords: *Evaluation, Policy, Development.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan pembagian daerah yang terdiri dari ruang yang luas sampai yang terkecil yaitu provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter fiskal nasional dan agama, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainnya tanpa bantuan dari pemerintahan daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara Kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang berbentuk Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal (1), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa memberi peluang menjadikan desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berawal dari mempertegaskan kedudukan desa, yang tidak lagi menjadi sub-ordinasi pemerintah daerah (kabupaten/kota), melainkan otonomi desa langsung dan bukan berada dibawah pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya desa menjadi sub-ordinasi dari pemerintah kabupaten yang hanya menjalankan kewenangan atas penugasan/pendelegasian dari pemerintah kabupaten. Saat ini desa memiliki peran strategis untuk mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa.

Kewenangan desa itu sendiri diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa mengenai Kewenangan Desa meliputi: Kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Desa mengenai Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketiga lembaga tersebut harus terus bersinergi, membangun kekuatan dan kerja sama secara harmonis dan secara terus menerus. Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu pancasila, undang-undang dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyelenggaraan pembangunan perlu disusun beberapa dokumen yang dijadikan pedoman pelaksanaan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD (5 tahun), Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD (1 tahun) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Kewenangan daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh seluruh

Pemerintah Daerah, dalam hal ini termasuk Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dalam upaya menyusun suatu perencanaan pembangunan diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD Kabupaten Pelalawan harus menyusun rangkaian dokumen perencanaan daerah.

Perencanaan Pembangunan Desa menjadi syarat desa untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Tanpa Perencanaan pembangunan (dokumen perencanaan pembangunan) desa tidak akan dapat mengelola keuangan desa dan melaksanakan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selain itu RPJM berfungsi sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Kepala Desa di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan, sesuai

dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun nama-nama Desa, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yaitu :

Tabel 1.1: Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Desa Tanjung Beringin	1.450	17,00	85
2	Desa Talau	2.328	83,00	28
3	Desa Kesuma	6.947	510,00	14
4	Desa Betung	1.653	50,00	33
5	Kelurahan Sorek Satu	13.650	80,00	171
6	Desa Sorek Dua	2.661	115,00	23
7	Desa Dundang	4.424	144,00	31
8	Desa Surya Indah	2.119	12,90	164
9	Desa Beringin Indah	1869	13,20	142
10	Desa Sialang Indah	2.682	13,50	199
11	Desa Teratak Manuk	2.262	22,50	101
12	Desa Palas	2.040	95,00	21
13	Desa Harapan Jaya	1.350	13,50	116
14	Desa Meranti	1.583	10,40	152
15	Desa Kemang	2.731	103,50	26
16	Desa Batang Kulim	3.694	68,00	54
17	Desa Sido Mukti	1.899	6,80	279

Sumber: Kantor Desa Harapan Jaya Tahun 2016

Dari data diatas Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki 17 Desa, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya mengambil 2 Desa sebagai sampel penelitian.

Adapun nama Desa yang menjadi sampel ialah, Desa Harapan Jaya , Desa Meranti. Penulis meneliti di 2 desa tersebut karna Desa Harapan Jaya merupakan penghubung dan merupakan desa yang bersebelahan dengan desa Harapan Jaya.

Desa Harapan Jaya adalah daerah Transmigrasi yang merupakan bagian dari wilayah Desa Meranti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Jumlah Penduduk laki-laki 657 jiwa, jumlah penduduk perempuan 693 jiwa jumlah keseluruhan penduduk desa harapan jaya adalah 1350 jiwa dan jumlah kepala keluarga adalah 360 kk.

Adapun Program-Program yang telah disusun dan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah desa yang direncanakan dan diputuskan oleh Kepala Desa diantaranya dapat dilihat pada tabel I.2 berikut:

**Tabel I.2 : Rencana Pembangunan Desa Harapan Jaya
KecamatanPangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun
2011-2016**

No	Uraian Proyek	SKPD Pengelola Program/Keg	Vol/Unit	Prakiraan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Kantor Desa	BPMD Kab.	1	Rp. 600 juta	Selesai
2	Imunisasi Dasar Untuk Balita	Dinkes Kab.	200	Rp. 200 juta	Belum Terlaksana
3	Pembangunan Balai Makam	-	1	Rp.200 juta	Belum Terlaksana
4	Pem. Rukanbabinkant ib-mas	APBDes	1	Rp. -	Selesai
5	Pembuatan Turap	ADD	800	Rp. 350 juta	Belum Selesai
6	Pengaspalan Jalan Poros Desa	Dinas PU Kab.	4000	Rp. -	Belum Selesai
7	Pembangunan Gorong- gorong	ADD	6 Unit	Rp. -	Belum Selesai

1	2	3	4	5	6
8	Pembangunan Box Coulvert	ADD	3 Unit	Rp. -	Belum Selesai
9	Pembangunan Drainase	ADD/APBD 2017	-	Rp. -	Belum Selesai
10	Pembangunan Gedung Serba Guna	-	1	Rp. -	Selesai
11	Pembangunan Gorong- gorong	ADD	6 Unit	Rp. -	Belum Selesai
12	Pembangunan Box Coulvert	ADD/APBN20 17	3 Unit	Rp. -	Belum Selesai
13	Pembangunan Drainase	ADD/APBD 2017	-	Rp. -	Belum Selesai
14	Rehab bangunan Postu dan Rumah Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten	1	Rp. -	Selesai

(Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Desa Harapan Jaya)

Dari tabel diatas terdapat program-program dan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Harapan Jaya yang telah disusun dan diputuskan oleh Kepala Desa melalui musyawarah yang bertujuan untuk melihat pembangunan apa saja yang belum selesai, belum terlaksana dan yang akan dibangun melalui keputusan kepala desa. Dari program-program atau usulan rencana kegiatan yang dimaksud, Penetapan kebijakan Kepala Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memiliki peran penting didalamnya, yakni untuk menyusun, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program-program pembangunan yang ada didesa tersebut.

Dari tabel tersebut dapat dilihat masih banyaknya program-program yang belum terlaksana dan masih banyak pembangunan di desa Harapan Jaya yang harus diselesaikan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan.

Dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa meliputi

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha , hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Desa Telah dijelaskan, Bahwa:

- (1) Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun Masalah-Masalah dan Tindakan Pemecahan Masalah di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 : Penentuan Masalah Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Tindakan yang Layak
1	2	3	4	5
1	Jalan lingkungan mulai bergelombang	- Masyarakat desa kurang perhatian terhadap kondisi	- Tenaga gotong-royong	- Perbaikan jalan yang rusak
2	Jalan poros kantor desa mulai longsor	- Belum ada bangunan penahan tanah	- Tenaga Kerja - Gotong-royong	- Pem. Turap yg diprogramkan didlm RPJMDes
3	Gorong-gorong banyak yang sudah hancur	- Transportasi utk mengangkut hsl pertanian kurang lancar dan pd musim hujan terjadi banjir	- Tenaga Kerja - Sumber Dana	- Pembangunan gorong-gorong dan pem. Tanggul penahan air
4	Biaya operasional pemdes masih rendah	- Blm tersusunnya kep. op. Pemdes	- Lembaga - Peng. Lengkap	- Penyusunan operasional pemdes
5	Dimusim kemarau kekurangan air	- Di desa timbul penyakit kulit	- Gotong-royong - Tenaga Kerja	- Pemb.sumur bor yg diprogramkan dalam RPJMDes
6	Jalan poros desa bila hujan becek dan licin	- Jalan poros desa dimusim hujan terjadi banjir krna sarana, pra- blm dibangun	- Tenaga Kerja - Sumber Dana	- Pengaspalan jalan desa/ pemb. Jembatan desa, gorong-gorong yg di prgramkan dlm RPJMDes

1	2	3	4	5
7	Desa belum memiliki gedung yg dipakai untuk berbagai kegiatan	- Desa belum memiliki gedung serba guna	- Lahan - Tenaga Kerja	- Pemb. Gedung serbaguna yang diprogramkan dalam RPJMDes

(Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Desa Harapan Jaya)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masalah di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sangatlah banyak, hal tersebut terjadi akibat lemahnya kesadaran dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berswadaya dan dalam pemeliharaan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis dapat dilaporkan, terdapat fenomena atau kendala pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan antara lain:

1. Masih ada program yang sudah direncanakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang belum terealisasi.
2. Pembangunan yang tidak sesuai waktu pengerjaannya / waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa (atau desa) yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berdurasi 6 (enam) tahunan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu desa jika melihat pelaksanaan dan capaiannya.

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
2. Apa hambatan-hambatan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
 2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
 2. Bagi aktifitas akademik, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
 3. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri

BAB II

STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjukkan kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya. Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang

dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Strong dalam Syafiie (2005:22) Mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti dalam pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam

rangkapenyelenggaraan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenapupaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

2. Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan juga menyangkut *design* dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketatanegaraan yang baik. Manajemen pemerintahan terdiri atas serangkaian keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi langsung sumber daya manusia dan orang-orang yang bekerja pada organisasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan agar sumber daya manusia didalam organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Menurut Stoner, ET. Al dalam Zulkifli (2005:28) Mengatakan Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Wahyudi (2002:12) Menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan , dan pemeliharaan sumber daya manusia.
2. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesign struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
3. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya dibidang tenaga kerja.

Disamping fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional. Dimana pada dasarnya fungsi operasional dari manajemen sumber daya manusia dapat diklarifikasikan dalam tiga fungsi operasional seperti diungkapkan oleh Wahyudi (2002:14) yaitu pengadaan dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pengadaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja. Sedangkan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dalam ruang lingkup pemeliharaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin syarat dasar kemampuan kerja.

Manajemen pemerintahan menurut Rasyid (2000:148) adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang di capai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam proses menghimpun dan menggerakkan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dalam hubungan ke dalam, manajemen pemerintahan bertanggungjawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertical dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah, sehingga kreativitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus.

Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggungjawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu :

1. Pelayan (Service) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
2. Pemberdayaan (empowerment) yang akan mendorong kemandirian masyarakat.
3. Pembangunan (development) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kebijakan manajemen pemerintahan dalam menjamin kesuksesan mencapai misi pemerintahan menggunakan pendekatan Kompetisi dan desentralisasi serta mengharuskan kepemimpinan pemerintahan mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit pada berbagai tingkatan untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri.

Kompetisi merupakan kunci untuk membuka kemacetan birokratik yang seringkali terjadi di lingkungan pemerintahan. Desentralisasi akan lebih menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta membuka peluang bagi inovasi. Kompetisi dan desentralisasi merupakan kata kunci di dalam sistem manajemen pemerintahan modern. Keduanya merupakan pilihan-pilihan strategis dalam pengembangan organisasi pemerintahan yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kerja yang konstruktif, yang mendorong aparat bekerja lebih keras dan kreatif.

3. Konsep Evaluasi

Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakan tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar dari pada disiplin ketat dan tahapan waktu. (Nurcholis, 2005 : 169)

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala terhadap hasil kebijaksanaan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2003 : 608).

Kriteria – kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003 : 601) dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar – benar berguna atau bernilai.

Menurut Ndaha (2003 : 201) mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara fakta dan analisisnya. Kemudian terdapat berbagai model evaluasi tersebut antara lain :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan treatment) tolak ukurnya adalah *before*.

2. Model *das-solen das-sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya yang senyatanya.
3. Model kelompok kontrol.

Menurut Laster dan Stewart (2000 : 126) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Agustino, 2012 : 185).

Adapun menurut Anderson mengemukakan bahwa Evaluasi adalah “sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian tujuan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak-dampak. (Winarno, 2014 : 166)

Menurut (Gomes, 2006 : 133) untuk mengukur kontribusi dari para pegawai dalam melakukan evaluasi dapat digunakan beberapa cara yakni :

1. Kelayakan pekerjaan.
2. Karakteristik perseorangan.
3. Kualitas dari performansi pegawai.

Menurut Subarsono (2009 : 119-120) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan.
5. Untuk mengetahui apa bila ada penyimpangan.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Suchman (dalam Winarno, 2010 : 233) mengemukakan ada enam langkah dalam Evaluasi Kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Dskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

4. Teori Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasikan bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam sektor ketertiban umum.

Menurut William N Dunn (2003:608) analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan (*policy Future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian

terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*policy performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2003: 107-109).

Sedangkan Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yg dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (dalam Nugroho, 2004: 3). Selain itu Dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever goverment chose to do or not todo*) (dalam Wahab, 2008: 51).

Selanjutnya Lasswell dan Abraham mengatakan kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah . (Nugroho, 2004: 4). David Easton melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah (dalam Nugroho, 2004: 4).

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, Menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu (Islamy,1992:25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho,2004:158). Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan (Hassel, 2005:13). Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran tujuan publik yang berupa “ outcome “ (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2004:174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel

“*content of policy*”(isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*”(lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasaan
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijakan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :

- a. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai
- b. Membentuk program-program kegiatan
- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan(Soenarko,2005:192).

Menurut Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada “empat tempat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

a. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/ masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti pengelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.

c. Ketepatan Target Kebijakan

Ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal yaitu: pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk intervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi

target mendukung atau menolak. Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.

d. Ketepatan Lingkungan Kebijakan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan, yaitu: pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive intitution* yang berkenaan dengan interpretasi dan lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni, dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.

5. Evaluasi Kebijakan.

Menurut Jones (1994:357) Evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Selanjutnya Weiss (dalam Jones,

1994:355) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata kriteria yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang meneliti atau mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan kriteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan dimasa mendatang.

Menurut Sudjana (2006:1718), dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik buruknya suatu kebijakan karena kegiatan tersebut termasuk pada keputusan (*judgement*). Evaluasi Kebijakan bukan kegiatan untuk mengukur karakteristik unsur-unsur kebijakan, seperti komponen, proses, dan hasil kebijakan, sebab kegiatan itu lebih tepat apabila dikategorikan kedalam pengukuran (*measurement*). Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk mencari kesalahan orang lain atau lembaga, mengetes dan mengukur, atau memutuskan suatu yang berkaitan dengan program.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan/program. Boyle (dalam Suharto, 2006:120) lebih jauh lagi, mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksana atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran

3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut Dunn (2003:609-610) fungsi evaluasi yaitu: Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003:429) yaitu:

- a. Efektifitas

Menurut Dunn (2003:429) efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

- b. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:430) efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usah yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau

layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn,2003:430).

c. Responsivitas

Menurut Dunn (2003:437) responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn,2003:437).

d. Ketepatan

Ketepatan berarti keyakinan, menurut Dunn (2003:499) kelayakan (appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Menurut Dunn (2003:608-609) evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

- a. Fokus nilai, Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- b. Interdependensi Fakta-Nilai, Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
- c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, Tuntutan evaluasi, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
- d. Dualitas nilai, Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara

6. Konsep Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada periode yang akan datang. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal sehingga perlu disusun suatu perencanaan laba agar kemampuan yang dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara terkoordinasi dan terkendali.

Di dalam suatu organisasi, perencanaan merupakan salah satu fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sebenarnya hanya melaksanakan apa yang telah dibuat dalam perencanaan. Jadi perencanaan merupakan tolak ukur bagi manajemen atas kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

Perencanaan menurut Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Adapun menurut Sjamsulbachri (2004:15) perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut

SP. Siagian mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan dimasa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Y.Dior berpendapat perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, dalam rangka mencapai sasaran tertentu.

Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dari suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan pilihan (setting up choices)
2. Penetapan penagihan sumber daya (resources allocation)
3. Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives)

4. Berfikir system,holistik, dan berkelanjutan (sustainable development)

Adapun manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penuntun arah dan acuan pembangunan
- b. Minimalisasi Ketidakpastian.

Menurut Harjanto Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai.

Bintoro Tjokrominoto mendefenisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pramudji Atmusudirdjo mengatakan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilaman, dan bagaimana melakukannya.

Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa pengertian Perencanaan yaitu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dalam pengertian perencanaan ini ada pendapat bahwa perubahan selalu saja terjadi. Perubahan dalam lingkungan ini selalu diantisipasi dan hasil antisipasi ini dipakai agar perubahan itu dapat berimbang. Artinya bahwa perubahan yang terjadi diluar pengajaran tidak jauh berbeda dengan perubahan yang akan terjadi pada organisasi tersebut, dengan harapan agar suatu organisasi tidak mengalami keguncangan. Jadi makna perencanaan disini ialah usaha mengubah organisasi agar sejalan dengan perubahan lingkungannya.

7. Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, Pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan hanya pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan yang seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro. Mudrajat, 2013:5). Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih), sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Siagian (1983), ide pokok pembangunan mengandung makna:

1. Pembangunan merupakan satu proses yang tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional.

Pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi bagi, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional. (Tjokroamidjojo dan Mustoipadidjaya dalam Sufian, 2003:2).

Menurut Fakih (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Menurut Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah(2005) istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) Bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Inayatullah Menurutny pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-

nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Kemudian Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya lebih lanjut menjelaskan bahwa “ Sebagai suatu proses, pembangunan adalah rangkaian perubahan majemuk dalam bidang ideology, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat atau nasional suatu bangsa. Proses pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila syarat-syarat sosial politik sudah terpenuhi artinya suatu bangsa sudah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam bidang politik dan sosial. (dalam Sufian, 2003:3).

Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai”. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal

ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
- d. Prasarana produksi saluran air.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama /Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan pada hasil
1	Nur Willy	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) 2010-2015 Kabupaten Barru	1. Sama-sama evaluasi 2. Sama-sama pembangunan	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah masih belum terealisasi dengan baik, dan perangkat desa belum bisa memahami cara ataupun penyusunan rpjmd itu sendiri. 2. Tahun penelitian
2	Budi Santoso	Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes) Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya	1. Sama-sama kajian tentang Pembangunan Desa	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak Perangkat ataupun masyarakat desa yang belum memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah desa. 2. Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Tanjung Raya

Sumber : [Http://Jurnal.Pemerintahan.com](http://Jurnal.Pemerintahan.com)

Dari tabel diatas maka di peroleh persamaan yakni pada bidang pembangunan, namun disini fokus atau lokasinya berbeda dan juga hasilnya tentu berbeda karena analisis yang digunakan juga berbeda.

C. Kerangka Pikiran.

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu. Berdasarkan teori yang diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar I.1 : Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



(Sumber: Data Modifikasi Penulis, Tahun 2019)

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang da makan penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Pelaksanaan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik “.

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasikan konsep-konsep yang dipakai konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
2. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat dokumen perencanaan untuk periode enam tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa (atau desa) yang memuat arah kebijakan pembangunan desa , arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan.

3. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
4. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
5. Responsivitas, Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437).
6. Ketepatan, Ketepatan berarti kelayakan, kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Adapun penjabaran variabel-variabel Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut kedalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 – 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan PangkalanKuras Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang di Nilai/Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
1. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari pro-gram pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan (Wahab,2008:52	Evaluasi	1. Efektifitas	a. Kejelasan dalam hal Pembangunan b. Pembangunan dinilai sederhana c. Pemberitahuan mengenai Pembangunan sudah jelas	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Pembangunan berjalan dengan baik b. Pembangunan/ Produk yg diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
4				

1	2	3		5
2. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William NDunn (2011:68), bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dgn penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yg menya takan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yg lebih spesifik evaluasi berkenaan dgn produksi informasi mengenai nilai/ manfaat hasil kebijakan		3. Kecukupan	a. Adanya waktu dalam proses pembangunan b. Kejelasan mengenai waktu penyelesaian dalam proses pembangunan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pemerataan	a. Kejelasan mengenai biaya pembangunan b. Kewajaran penetapan biaya pembangunan c. Biaya yang diberikansesuai dgn peraturan yang ditetapkan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		5. Responsivitas	a. Adanya respon terhadap kinerja sekretaris desa. b. Adanya kompetensi kemampuan Sek. Desa yg bertugas melaksanakan Pembangunan c. Adanya respon terhadap Perangkat yang melaksanakan Pembangunan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6. Ketepatan	a. Adanya peralatan/ perlengkapan yg tersedia dalam memberikan pembangunan b. Adanya fasilitas yg tersedia dalam memberikan pembangunan	Baik Cukup Baik Kurang Baik

(Sumber: Data Modifikasi Penulis, Tahun 2019)

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, diukur melalui beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator. Kategori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu: Baik, cukup Baik, kurang Baik.

- Baik : Apabila semua indikator variabel berada pada kategori baik atau pada ukuran 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hanya 2-3 dari indikator variabel berada pada kategori baik dengan pengukuran 34-66%
- Kurang Baik : Apabila 0-1 dari indikator variabel berada pada kategori baik atau dengan pengukuran 0-33%.

Adapun untuk indikator evaluasi teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Efektifitas

- Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%
- Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%
- Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

2. Efisiensi

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

3. Kecukupan

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

4. Pemerataan

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

5. Responsibilitas

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

6. Ketepatan

Baik : Apabila semua item penilaian telah dilaksanakan atau dengan ukuran 67-100%

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 penilaian dapat dijalankan atau dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Apabila 0-1 dari item penilaian dapat dilaksanakan atau dengan ukuran 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang berbentuk analisa deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Menurut Arikunto (2006:12) “ Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif”.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (Iskandar,2008:66)

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan beberapa alasan atau pertimbangan

yaitu di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ini merupakan Daerah yang kurang pesat ataupun lamban dalam hal Pembangunan, yang mana lokasi tersebut terdapat beberapa masalah-masalah dalam hal pembangunan. Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang sedang merintis pembangunannya, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memiliki peran penting didalam pembangunan, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1 : Daftar Populasi dan Sampel Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Sekretaris Desa	1	1	100%
2	Perangkat Desa	5	3	20%
3	BPD	5	3	20%
4	Masyarakat Desa Harapan Jaya (Jiwa)	1350	17	1,11%
	Jumlah	1361	24	1,32%

Sumber: Kecamatan Pangkalan Kuras Kota Pelalawan, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik penarikan sampel, untuk sub populasi Sekretaris Desa dan pegawai atau pengurus, penulis menggunakan teknik sensus, karena jumlah populasi yang sedikit sehingga mudah diperoleh. Sedangkan teknik penarikan sampel yang populasinya adalah masyarakat, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan kelompok subjek yang mempunyai sifat tertentu dan mempunyai hubungan yang kuat dengan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, teknik ini dipilih untuk menghemat waktu serta biaya disebabkan banyaknya populasi yang ada untuk diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara. Adapun data tersebut adalah identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, serta pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum Kabupaten pelalawan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna tersaring dengan teknik kuesioner.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Samsaurman selaku Sekretaris didesa Harapan Jaya, dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih untuk memperoleh data data mengenai masalah yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan cara melakukan pengambilan gambar pada saat wawancara.

Penulis mengumpulkan data langsung dari desa Harapan Jaya untuk menghimpun keseluruhan data penelitian, dengan tujuan data tersebut dapat diamati langsung oleh peneliti. Dan juga berupa Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perubahan tahun 2015 – 2017.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Analisis data Kuantitatif adalah menggunakan data statistik. Dalam penelitian ini setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara *deskriptif*, yaitu : menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan di lapangan.

H. Jadwal Penelitian

Untuk dapat melihat jadwal penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011 – 2016 di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jadwal Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-															
		Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																
2.	Seminar UP																
3.	Revisi UP																
4.	Revisi Kuissioner																
5.	Rekomendasi Survey																
6.	Survey Lapangan																
7.	Analisis Data																
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																
10.	Ujian Konferehensif Skripsi																
11.	Revisi Skripsi																
12.	Penggandaan Skripsi																

(Sumber Modifikasi Penulis, 2019)

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- ☐ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak

- ☐ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- ☐ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- ☐ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

4.2 Profil Wilayah Kabupaten Pelalawan

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu

- sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan:

1. Langgam, luas 144.245,09 Ha
2. Bunut, luas 40.802,77 Ha
3. Pangkalan Kuras, luas 118.388,79 Ha
4. Kuala kampar, luas 150.265,19 Ha
5. Pangkalan Kerinci, luas 19.355,53 Ha
6. Ukui, luas 129.956,06 Ha
7. Pelalawan, luas 149.811,31 Ha
8. Pangkalan Lesung, luas 50.485,12 Ha
9. Kerumutan, luas 96.003,66 Ha
10. Teluk Meranti, luas 423.984,41 Ha
11. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
12. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0 -15\%$ dan $15-40 \%$.

Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian $\pm 3,5$ meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar $\pm 413,5$ km, dengan kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter, lebar rata - rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan,sumber air bersih,budidaya perikanan dan irigasi.

Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir,danau,lempung,sisa tumbuhan dan gambut.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celcius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celcius. Suhu udara maximum 35,4 derajat celcius terjadi pada bulan mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celcius terjadi pada bulan juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83 persen.

b. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321.947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

c. Tenaga Kerja

Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2010 pencari kerja yang mendaftar di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah **3.708** orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1.382 orang.

d. Tenaga Kerja

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten (UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

e. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor

Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karet Propinsi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.128.000,-

Di Kabupaten Pelalawan Penduduknya merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis. Di Kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku Sakai.

4.3 Kependudukan

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58 persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak

179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002—2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1, lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

b. Sebaran Penduduk

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit

dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3,90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

c. Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebanyak 83.648 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di Kecamatan Bunut sebanyak 3.311 rumah tangga. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

d. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi rasio jenis kelamin lima tahun yang lalu, tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sama yaitu 111.

Kecamatan Ukui memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Bandar

Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di Kecamatan Bandar Petalangan.

e. Kepadatan Penduduk

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km² dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km² kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km². Dari dua belas kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Merantimerupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84 km² atau 30,45 persen dari luas wilayah Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah Penduduk pertengahan tahun 2011, Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni oleh 14.414 orang penduduk dengan kepadatan penduduk tiga orang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai kecamatan dengan penduduk terjarang di Kabupaten Pelalawan. Sebaliknya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang wilayahnya terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 397 orang per km² dan jumlah penduduk sebesar 76.884 orang.

f. Kelompok Umur

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif. Dari 321.947 jiwa penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011, sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) merupakan penduduk dengan usia 15—64 tahun. Sedangkan penduduk menurut kelompok

umur yang jumlahnya paling kecil adalah penduduk berusia 65 tahun lebih atau penduduk usia tidak produktif, yaitu sebesar 1,55 persen (4.991 jiwa).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian terdiri dari Sekretaris Desa 1 orang, Perangkat Desa 3 orang, BPD 3 orang, dan Masyarakat 17 orang.

1. Identitas Responden berdasarkan Umur :

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan umur, seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 1 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1	21-30	9	37.5 %
2	31-50	15	62.5 %
Jumlah		24	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Pada tabel V. 1 dari 24 responden dapat terlihat responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 9 responden atau 37,5%, sedangkan responden yang berumur 31-50 adalah 15 orang atau 62,5 %.

2. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	10	41.67%
2	S2	14	58.33%
Jumlah		24	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Pada tabel V.2 dari 24 responden yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat 10 orang responden atau 41, 67 %, yang berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 14 orang atau 58.33%.

Berdasarkan tingkat pendidikan dari masing-masing responden dapat disimpulkan bahwa responden yang digunakan cukup berkompeten untuk digunakan sebagai responden didalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Menurut Dunn (2003:608-610) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Keberhasilan dalam menciptakan Pembangunan yang baik dan berkualitas serta memuaskan Sekretaris Desa termasuk dalam Pembangunan dari RPJMDes juga ditentukan oleh beberapa unsur.

B.1. Efektivitas

Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dalam proses Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, suatu langkah-langkah yang berurutan dalam proses pembangunan sejak rencana hingga selesainya proses Pembangunan. Pembangunan yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas

Sekretaris Desa harus ditetapkan secara efektif agar penyelenggaraan Pembangunan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Untuk mengetahui Efektivitas Pembangunan yang diterapkan dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2015-2020 Di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, untuk jawaban dari responden yang ada di Desa tersebut maka bisa dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa tentang Efektivitas Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembangunan yang diberikan dan kejelasan dan kepastian	4	3	0	7
2.	Pembangunan dinilai sederhana	3	3	1	7
3.	Pemberitahuan mengenai Pembangunan sudah jelas	2	5	0	7
Jumlah		9	11	1	21
Rata-rata		3	3	1	7
Persentase		42,8%	52,3%	14%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dari 7 Responden Unsur Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan maka ada 3 Item Penilaian peneliti untuk menanggapi dari jawaban Responden tersebut. Dari item penilaian tentang Pembangunan yang diberikan dan kejelasan serta kepastian seperti ketepatan syarat-syarat untuk kepengurusan, kepastian waktu selesai kepengurusan dan

kejelasan dalam memenuhi apa yang diminta oleh pemohon, maka diperoleh 4 responden yang menjawab Baik dan 3 responden yang menjawab cukup baik serta tidak ada yang menanggapi bahwa Pembangunan yang diberikan kurang baik..

Kemudian item penilaian yang menjelaskan tentang Pembangunan dinilai sederhana seperti apa yang harus dipenuhi pemohon dalam kepengurusan, responden yang menjawab Baik sebanyak 3 orang , Cukup Baik 3 orang dan kurang baik 1 orang dengan pernyataan bahwa semua Pembangunan sudah dilaksanakan. Penyebab Responden yang menjawab kurang baik adalah kurangnya sosialisasi secara merata oleh petugas untuk menginformasikan tentang Pembangunan.

Item penilaian ketiga yaitu Pembangunan yang sudah jelas, responden yang menjawab Baik sebanyak 2 orang, cukup baik 5 orang dan tidak ada responden yang menjawab kurang baik. Seperti penjelasan di atas bahwasanya Pembangunan yang diberikan didalam formulir sudah jelas tentang syarat apa yang harus dipenuhi.

Dari kesimpulan ketiga item penilaian yang ditanggapi Responden, maka dapat di peroleh, rata-rata 3 atau 43 % tanggapan responden kategori Baik adapun alasan jawab Baiknya dimana Pembangunan yang diberikan menurut kami sudah baik dan sudah jelas sesuai dengan informasi yang disampaikan namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki adapun jawaban, 3 atau 57 % tanggapan responden kategori Cukup Baik, dengan alasan masih terdapat beberapa Pembangunan layanan yang belum sesuai keseluruhannya dan 1 orang atau 4% adalah kategori Kurang Baik tentang Pembangunan Pembangunan pada

Desa tersebut. Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar atau 57% tanggapan responden tentang Pembangunan adalah kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa , beliau mengatakan:

“Hasil yang didapat terletak pada kategori Cukup Baik, karena menurut mereka Pembangunan yang diberikan sudah berjalan baik di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan setelah direkomendasi oleh Desa di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”(Hasil Wawancara tanggal 3 Oktober 2018.)

Selanjutnya jawaban unsur Masyarakat maka dapat dilihat tanggapan responden dari Masyarakat yang menikmati pembangunan tersebut sebagai berikut :

Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Efektivitas Pembangunan dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011- 2016 Di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pembangunan yang diberikan dan kejelasan dan kepastian	4	9	4	17
2.	Pembangunan dinilai sederhana	5	7	5	17
3.	Pemberitahuan mengenai Pembangunan sudah jelas	3	10	4	17
Jumlah		12	26	13	51
Rata-rata		4	9	4	17
Persentase		23,5%	50,98%	25,49%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dari 17 Responden unsur Sekretaris Desa maka ada 3 Item Penilaian peneliti untuk menanggapi dari jawaban Responden tersebut. Item Penilaian pertama yaitu Pembangunan yang diberikan dan kejelasan dan

kepastian, menjawab baik ada 4 orang dan cukup baik 9 orang, adapun alasannya karena syarat yang diberikan oleh Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan masih dikatakan dapat dipenuhi. Sedangkan yang menjawab kurang baik ada 4 orang, selain dengan Pembangunan yang diberikan jelas, tetapi masih saja ada petugas yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Item penilaian yang kedua yaitu Pembangunan dinilai sederhana, yang menjawab Baik ada 5 orang dan cukup baik 7 orang tanggapan bahwa apa yang disampaikan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan yang menjawab Kurang baik 5 orang dengan alasan tersendatnya pembangunan Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menjadi terkendala.

Maka dapat diuraikan dari 17 responden, rata-rata 4 atau 23,5 % tanggapan responden kategori Baik dengan alasan bahwasanya Pembangunan Pembangunan memang sudah ada, 9 atau 50,98% tanggapan responden kategori Cukup Baik dengan alasan belum semua Pembangunan Pembangunan yang diterapkan dengan baik pada Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , dan 4 orang atau 25,49% adalah kategori Kurang Baik tentang Pembangunan Pembangunan pada Desa tersebut. Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar atau 50,98% tanggapan responden tentang Pembangunan adalah kategori Cukup Baik. Berdasarkan hasil kuisioner dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

“maka hasil yang didapat terletak pada kategori Cukup Baik, karena menurut mereka kejelasan waktu Pembangunan masih minim, karna banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu penyelesaiannya. hasil kuisioner tanggal 3 Oktobert 2018.)

Berdasarkan observasi peneliti terhadap indikator Pembangunan dengan penilaian cukup baik sesuai dengan kenyataan dari segi ketersediaan Pembangunan Pembangunan sudah baik, namun kejelasan dan kepastian waktu dalam menyelesaikan Pembangunan tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Pembangunan dinilai masih cukup sederhana serta belum adanya pemberitahuan mengenai Pembangunan dan Pembangunan.

B.2 Efisiensi

Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, Setiap proses Pembangunan pada umumnya menerapkan suatu Pembangunan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang dilayani, sesuai dengan kebutuhan administrasi yang ditetapkan pada Desa yang bersangkutan agar proses Pembangunan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Dalam Pembangunan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa tentang Efisiensi Pembangunan Pembangunan Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyampaian/Pemberitahuan mengenai Pembangunan /produk Pembangunan Sudah Jelas	2	2	3	7
2.	Pembangunan /Produk yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan	2	5	0	7
Jumlah		4	7	3	14
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		28,5 %	50%	21%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diuraikan tanggapan Responden dengan 2 item penilaian yaitu Penyampaian/Pemberitahuan mengenai Pembangunan /produk Pembangunan yang sudah jelas dengan jawaban responden kategori Baik 2 orang dan Cukup baik 2 orang alasannya sebagaimana yang telah diberitahukan melalui sosialisasi ke lapangan, Pembangunan yang diurus sudah sangat memudahkan. Dan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 3 orang alasannya disebabkan karena sosialisasi tersebut dilaksanakan tetapi tidak merata ke seluruh daerah. Ini disebabkan akses jalan atau jumlah petugas yang harus turun lapangan tidak mencukupi.

Item Penilaian kedua mengenai Pembangunan /Produk yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan, dengan responden yang

menjawab baik ada 2 orang dan cukup baik ada 5 orang alasannya sebagaimana dengan kebutuhan pemohon, maka Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memberikan berupa Pembangunan /produk yang proses penyelesaiannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Pembangunan (SOP). Dan responden yang menjawab kurang baik tidak ada, maka dikatakan bahwa Pembangunan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan pemohon.

Maka dapat kita uraikan bahwasanya jawaban responden Unsur Desa yang menjawab kategori Baik berada para rata-rata 2 dengan persentase 28,5%, dengan alasan penyampaian Pembangunan belum semuanya merata namun sudah ada disampaikan, kemudian yang menjawab cukup baik pada rata-rata 4 dengan persentase 50%, dengan alasan sudah disampaikan secara efisien namun belum seluruhnya. selanjutnya yang menjawab Kurang Baik rata-rata 1,5 dengan persentase 21%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa, beliau mengatakan:

“Dalam hal penyampaian mengenai Pembangunan/produk Pembangunan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sudah dinilai jelas, Sehingga harapannya supaya Pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.”(hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018.)

Maka selanjutnya penulis melihat jawaban responden Masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan“adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Efisiensi Pembangunan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyampaian/Pemberitahuan mengenai Pembangunan /produk Pembangunan Sudah Jelas	5	9	3	17
2.	Pembangunan /Produk yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan	6	7	4	17
Jumlah		11	16	7	34
Rata-rata		6	13	4	17
Persentase		33 %	47%	20%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dari 17 Responden Unsur Sekretaris Desa , dari item penelitian yang terdiri dari 2 yaitu penyampaian/pemberitahuan mengenai Pembangunan produk Pembangunan yang sudah jelas dengan kategori Baik sebanyak 5 responden dengan sangat jelas. Serta pegawai yang bertugas sudah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Dan kategori Cukup baik sebanyak 9 responden, artinya bahwa pemohon memiliki kepuasan tersendiri terhadap Pembangunan yang diberikan. Selain itu, yang menjawab kategori Kurang baik sebanyak 3 orang, dengan alasan bahwa proses pengurusan lama dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Item penilaian yang kedua yaitu Pembangunan /Produk yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan, dengan kategori Baik 6 responden alasannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Pembangunan (SOP). Kategori Cukup Baik ada 7 responden dengan alasan bahwa sebagian Pembangunan /produk yang diberikan sesuai tetapi ada saja oknum yang melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku, itu ditegaskan kembali dengan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4.

Berdasarkan tabel tersebut dari 17 responden tanggapan responden kategori Baik adalah 6 atau 33%, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 13 atau 47 %, dan tanggapan responden kategori Kurang Baik 4 atau 20%. Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas sebagian besar tanggapan responden tentang Pembangunan adalah kategori Cukup Baik. Berdasarkan hasil jawaban Masyarakat, beliau mengatakan:

“Maka untuk Efisiensi produk Pembangunan masih terdapat kesalahan dalam melengkapinya, ini karena Pembangunan yang harus disiapkan terlalu banyak, dan itu berdampak pada terhambatnya upaya Pembangunan Pembangunan.”(hasil kuisioner tanggal 3 Oktober 2018.)

Kesimpulan penulis terhadap ini, terdapatnya kendala atau kurang seksama untuk melengkapi Pembangunan, dikarenakan Pembangunan yang begitu banyak, maka dari itu Sekretaris Desa yang berkepentingan harus lebih memperhatikan dan teliti untuk mempersiapkan atau melengkapi Pembangunan tersebut, agar tidak terjadi kesalahan.

B.3 Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah, Waktu dan unsur Pembangunan sangat penting diperhatikan agar dapat memberikan Pembangunan yang baik. Desa sebagai penyedia pelayanan publik harus dapat menerapkan Pembangunan yang efektif dan efisien agar proses Pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan cepat. Kemampuan kerja sumberdaya manusia dan kelengkapan fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia juga sangat penting untuk memberikan Pembangunan yang efisien dalam waktu penyelesaian Pembangunan.

Adapun Tanggapan Responden dari Unsur Desa sebagai penyelenggara Pembangunan sebagai berikut

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa Tentang Kecukupan Waktu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dalam Pembangunan Desa memakan waktu	3	4	0	7
2.	Kejelasan/kepastian mengenai waktu penyelesaian proses Pembangunan	2	4	1	7
Jumlah		5	8	1	14
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase		36%	57%	7%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas, berdasarkan Indikator Kecukupan dengan 2 (dua) Item penilaian yang mana penulis menguraikan jawabannya untuk item pertama, Item Kecukupan dengan kategori Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memakan waktu maka yang menjawab baik dari 7 responden berjumlah 3 orang responden dengan alasan bahwasanya kecukupan dalam waktu pengurusan memang sudah ada perbaikan dari sebelumnya artinya peningkatan untuk kategori kecukupan waktu pengurusan sudah bisa dikatakan baik,yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 4 orang responden dengan alasan masih terdapat beberapa kendala oleh sebab itu memakan waktu yang agak lama, sementara itu yang menjawab kurang baik berjumlah nol responden artinya untuk permasalahan waktu menurut responden tidak ada yang tidak siap hanya saja waktunya saja dalam penyelesaiannya.

Selanjutnya untuk Item kedua yaitu Kejelasan/kepastian mengenai waktu penyelesaian proses Pembangunan responden yang menjawab kategori baik berjumlah 2 responden dengan alasan kepastian waktu ada yang diinformasikan dan ada yang tidak dikatakan kejelasan mengenai waktu penyelesaiannya, namun yang menjawab Cukup baik responden yang menjawabnya berjumlah 4 respon yang ada masih banyak yang tidak mengetahui kejelasannya meskipun sebagian besar sudah ada yang mengetahui namun yang menjawab kurang baik berjumlah 1 orang responden dengan alasan bahwasanya terkait kejelasan waktu penyelesaian memang belum ada.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat kita uraikan bahwasanya yang menjawab baik dengan rata-rata 2 atau sama dengan 36%. selanjutnya yang menjawab cukup baik rata-rata berjumlah 4 dengan 57%, dan tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik adalah rata-rata 1 atau 7%. Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar tanggapan responden tentang Kecukupan waktu Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah kategori Cukup Baik.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Maka hasil yang didapat terletak pada kategori Cukup Baik, karena menurut mereka Kecukupan waktu Pembangunan dan kejelasan mengenai waktu yang diberikan belum jelas dan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengalami kesulitan dalam proses Pembangunan, sehingga waktu yang dibutuhkan agak lama.”(hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018.)

Adapun tanggapan responden Masyarakat mengenai Kecukupan, untuk waktu yang dibutuhkan penyelesaian Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tabel V.8 Distribusi Tanggapan Responden unsur Masyarakat Tentang Kecukupan Waktu Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDES) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dalam Pembangunan yang memakan waktu atau tidak memakan waktu	3	7	7	17
2.	Kejelasan/kepastian mengenai waktu penyelesaian proses Pembangunan	4	8	5	17
Jumlah		7	15	12	34
Rata-rata		4	8	6	17
Persentase		20,6%	44%	35,3%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 17 responden dengan Item pertama Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDES) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk kecukupan waktu yaitu memakan waktu yang menyatakan Baik adalah 3 orang responden dengan alasan waktunya sudah ditetapkan namun yang menjawab cukup baik berjumlah 7 orang dengan alasan waktu yang di butuhkan dalam penyelesaian Pembangunan selanjutnya yang menjawab kurang baik berjumlah 7 orang responden dengan alasan belum ada kejelasan waktu untuk yang tidak memenuhi Pembangunan .

Selanjutnya untuk Item kedua Kejelasan/kepastian mengenai waktu penyelesaian proses Pembangunan untuk yang menjawab baik berjumlah 4 orang dengan alasan mengenai waktu Pembangunan sudah dianggap baik,

selanjutnya yang menjawab Cukup Baik berjumlah 8 orang dengan kecukupan waktu proses Pembangunan sudah dianggap cukup baik, namun responden yang menjawab kurang baik berjumlah 5 orang responden dengan alasan bahwasanya memang masih di anggap kurang baik karna memang belum ada kepastian waktu.

Dari uraian diatas maka bisa ditarik kesimpulan yang menjawab baik dengan rata-rata 4 atau 20,6%, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 8 atau 44%, dan tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik adalah 6 orang atau 35,3%. Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar tanggapan responden tentang Kecukupan waktu Pembangunan dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Kabupaten Siak adalah kategori Cukup Baik.

Berdasarkan tanggapan responden tentang Kecukupan waktu Pembangunan mengenai Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, berada pada kategori Cukup Baik, ini menunjukan bahwa Kecukupan waktu Pembangunan ini tidak memakan waktu yang lama. Berdasarkan hasil kuisioner dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

“Mengenai Kecukupan waktu Pembangunan sudah Cukup Baik. Dikarenakan apabila proses pembangunan tidak ada hambatan maka pembangunan akan berjalan dengan baik.”(hasil kuisioner tanggal 3 Oktober 2018)

Kesimpulan penulis terhadap ini, Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai kecukupan waktu sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat saat Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B.4 Pemerataan

Pemerataan adalah Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok Sekretaris Desa yang berbeda, Unsur Pemerataan biaya dalam Pembangunan adalah suatu ketentuan pembayaran yang ditetapkan penyelenggara Pembangunan sebagai pembayaran atas layanan jasa yang disediakan. Dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan biaya Pembangunan merupakan ketentuan pembayaran yang ditetapkan pemerintah.

Adapun tanggapan responden dari Unsur Desa mengenai Pemerataan biaya yang ditetapkan dalam Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

Tabel V.9 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa Penelitian tentang Pemerataan Biaya Pembangunan pada Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kejelasan/kepastian mengenai biaya administrasi Pembangunan yang ditetapkan	4	2	1	7
2.	Kewajaran dalam penetapan biaya administrasi Pembangunan	5	1	1	7
3.	Biaya Pembangunan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	6	1	0	7
Jumlah		15	4	2	21
Rata-rata		5	1	1	7
Persentase		71%	19%	10%	100%

Sumber : Data Olahan Pelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 7 responden pada Item Pertama yang menyatakan Baik berjumlah 4 orang responden dengan alasan kepastian administrasi tentang pemerataan biaya belum seluruhnya diperjelas sehingga memang ada yang menyatakan baik. selanjutnya yang menjawab Cukup Baik berjumlah 2 responden dengan alasan bahwasanya proses adminstrasi penyelesaian terkait pemerataan biaya dan Pembangunan nya masih terdapat beberapa yang belum merata, selanjutnya yang menjawab kurang baik berjumlah 1 orang responden dengan alasan bahwasanya responden yang ditemui memang

Pembangunan diawal namun tidak memperpanjang sebab pemerataan biaya tidak ada kejelasan.

Selanjutnya untuk item kedua yang menjawab baik berjumlah 5 orang responden dengan alasan kewajaran dalam penetapan biaya tidak dipermasalahkan, yang menjawab kurang baik berjumlah 1 responden yang menurut mereka memang belum wajar selanjutnya yang menjawab kurang baik berjumlah 1 responden saja dengan alasan jawaban masih ada pemungutan diluar dari kewajaran biaya yang ditetapkan dalam Pembangunan yang digunakan.

Dari uraian diatas maka dapat penulis tarik analisa yang menjawab baik dengan rata-rata 5 atau 71%, dengan alasan tidak ada pemungutan biaya tambahan dalam Pembangunan, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 1 atau 19%, dengan alasan pada beberapa Pembangunan masih ada biaya tambahan tetapi jumlahnya tidak ditetapkan oleh pegawai pelaksana. Dan tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik tentang biaya Pembangunan diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan adalah 1 atau 10%. Berdasarkan tabel diatas di ketahui sebagian besar tanggapan responden tentang Pemerataan biaya Pembangunan yang diterapkan dalam diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan adalah pada kategori Baik.

Adapun tanggapan responden Masyarakat tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

Tabel V.10 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Penelitian tentang Pemerataan Biaya Pembangunan dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kejelasan/kepastian mengenai biaya administrasi Pembangunan yang ditetapkan	10	3	4	17
2.	Kewajaran dalam penetapan biaya administrasi Pembangunan	8	6	3	17
3.	Biaya Pembangunan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	8	5	4	17
Jumlah		26	14	11	51
Rata-rata		9	5	3	17
Persentase		51%	28%	21%	100%

Sumber : Data Olahan Pelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 17 responden pada item pertama yang menyatakan Baik berjumlah 10 orang responden dengan alasan bahwasanya biaya administrasi Pembangunan fasilitas yang tersedia dalam memberikan Pembangunan memang sudah baik kemudian bukan berarti semuanya sudah baik tetap ada responden yang menjawab Cukup Baik berjumlah 3 orang responden dengan alasan tidak semuanya terjadi pemerataan biaya pengurusan, kemudian yang menjawab kurang baik berjumlah 4 orang responden dengan alasan dimana akibat dari ketidak adanya kejelasan maka Sekretaris Desa enggan untuk mengurus rekomendasi izin tersebut.

Selanjutnya Item kedua yaitu kewajaran dalam penetapan biaya administrasi Pembangunan yang menjawab baik berjumlah 8 orang dengan alasan semua yang menjawab baik masalah biaya itu dianggap wajar, yang menjawab cukup baik berjumlah 6 orang responden dengan alasan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan selanjutnya yang menjawab kurang baik berjumlah 3 orang responden dengan alasan ketetapan biaya tambahan diluar administrasi Pembangunan.

Seterusnya Item ketiga yaitu biaya Pembangunan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan adapun yang menjawab Baik berjumlah 8 dengan alasan masih sama dengan alasan yang terdapat pada item kedua, yang menjawab cukup baik berjumlah 5 orang dan kurang baik 4 orang dengan alasan tetap sama dengan penjelasan sebelumnya.

Dari uraian diatas maka penulis bisa menguraikan jawaban responden untuk Indikator Pemerataan per item-item yang telah dijelaskan maka bisa diperoleh nilai rata-rata baik Berjumlah 9 atau 51%, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 5 atau 28%, dan tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik tentang biaya Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah 3 atau 21%. Berdasarkan tabel diatas di ketahui sebagian besar tanggapan responden tentang Pemerataan biaya Pembangunan yang diterapkan dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah pada

kategori Baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Mengenai Pemerataan biaya Pembangunan adalah relatif jadi dari hasil kuisioner yang saya berikan maka hasilnya terdapat dikategori Baik. Karena didalam masalah biaya ini Sekretaris Desa yang terlibat dalam pembangunan ini tidak terlalu mempermasalahkannya.” (hasil wawancara tanggal 3 Oktober.)

Berdasarkan hasil observasi tanggapan responden mengenai Pemerataan biaya Pembangunan adalah Baik, hal ini dilihat dari Kejelasan/kepastian mengenai biaya administrasi Pembangunan yang ditetapkan, Kewajaran dalam penetapan biaya administrasi Pembangunan dan Biaya Pembangunan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

B.5 Responsivitas

Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, sumberdaya manusia adalah unsur utama yang sangat dibutuhkan dalam operasional organisasi yang mana selain berperan sebagai perencana maka sumber daya manusia juga dapat berperan sebagai petugas atau pegawai pelaksana proses Pembangunan tersebut. Sumberdaya manusia juga adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan suatu proses Pembangunan dalam penyelenggaraan Pembangunan pada Desa. Pelaksanaan Pembangunan tentunya membutuhkan sumberdaya manusia dengan jumlah yang memadai serta kompetensi dan kemampuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, agar penyediaan layanan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Untuk mengetahui Responsivitas Unsur Desa dari sumberdaya manusia yang bertugas dalam Pembangunan. Dapat dilihat dari tanggapan responden berikut :

Tabel V.11 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa tentang Responsivitas Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bagaimana Responsivitas Sekretaris Desa	3	3	1	7
2.	Kompetensi/kemampuan Sekretaris Desa yang bertugas Melaksanakan Program Pembangunan	1	1	5	7
3.	Respon terhadap Perangkat yang melaksanakan pembangunan	1	1	5	7
Jumlah		5	5	11	21
Rata-rata		2	2	3	7
Persentase		24%	24%	53%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Pada tabel diatas menunjukan bahwa dari 7 responden untuk item pertama yaitu Bagaimana penetapan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adapun yang menjawab baik berjumlah 3, cukup baik berjumlah 3, kemudian yang menjawab kurang baik berjumlah 1 orang responden dengan alasan bahwasanya. Jika sumberdaya manusia memadai dan

berjalan dengan baik tentu kebijakan serta hasil yang didapatkan akan sangat memuaskan.

Untuk item kedua yaitu Kompetensi/kemampuan Sekretaris Desa yang bertugas Melaksanakan Program Pembangunan dalam penyediaan Pembangunan yang menjawab baik berjumlah 1, cukup baik 1, kurang baik 5, dengan alasan bahwasanya kompetensi petugas masih minim dalam proses penyelesaian pembangunan ataupun dalam perencanaannya. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan yg sampai sekarang belum atau tidak terealisasi.

Untuk item ketiga yaitu respon Respon terhadap Perangkat yang melaksanakan pembangunan yang menjawab baik berjumlah 1 orang, cukup baik 1 orang dan kurang baik berjumlah 5 orang, dengan alasan karna masih sedikitnya sumber daya manusia yang tanggap dalam pembangunan ini, sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti penyelesaian pembangunan yang tidak pada waktunya.

Dari uraian diatas maka penulis bisa menarik kesimpulan untuk rata-rata tanggapan responden yang dikategorikan Baik rata-rata adalah 2 atau 24 %, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 2 orang atau 24%, dan tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik adalah 3 atau 53%, berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebagian besar tanggapan responden tentang kompetensi petugas pemberi Pembangunan adalah Kurang Baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Mengenai Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Jika sumberdaya manusia memadai dan berjalan dengan baik dan mempunyai fasilitas yang layak tentu kebijakan serta hasil yang didapatkan akan sangat memuaskan.”(hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018)

Untuk mengetahui Responsivitas unsur Masyarakat Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dapat dilihat dari tanggapan responden berikut :

Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Responsivitas Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana Penetapan Sekretaris Desa yang ditugaskan dalam Pembangunan	3	8	6	17
2.	Kompetensi/kemampuan Sekretaris Desa yang bertugas Melaksanakan Program Pembangunan	2	7	8	17
3.	Respon terhadap Perangkat yang melaksanakan pembangunan	3	4	10	17
Jumlah		8	19	24	51
Rata-rata		3	6	8	17
Persentase		16%	37%	47%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 17 responden pada item pertama tentang Bagaimana Penetapan Sekretaris Desa yang ditugaskan dalam

Pembangunan yang menjawab kategori Baik berjumlah 3 orang dengan alasan bahwa Penetapan pegawai sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika penerimaan pegawai. Kategori Cukup Baik menjawab 8 orang dengan alasan yang sama, sedangkan kategori Kurang Baik berjumlah 6 orang dengan alasan bahwa kadang penetapan pegawai tidak sesuai dengan Standar Operasional Pembangunan (SOP).

Selanjutnya item kedua yaitu Kompetensi/ kemampuan sekretaris desa yang bertugas memberikan Pembangunan dengan kategori Baik sebanyak 2 orang dengan alasan apa yang diberikan pegawai dalam memberikan Pembangunan sudah sangat memuaskan, kategori cukup baik sebanyak 7 orang dengan alasan yang sama. Tetapi sebagian menjawab dengan kategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan alasan bahwa banyak penetapan pegawai yang ditugaskan tidak sesuai dengan tugas yang dikerjakan.

Item ketiga yaitu Respon terhadap Perangkat yang melaksanakan pembangunandengan kategori Baik sebanyak 3 orang dengan alasan masih ada pegawai yang bertugas sesuai dengan tugasnya, melayani dengan baik. Kategori cukup baik sebanyak 4 orang dengan alasan pada keluhan-keluhan yang disampaikan segera diproses. Tetapi ada sebagian yang menjawab dengan kategori Cukup Baik dengan alasan Pembangunan di Desa Harapan Jaya kurang ditanggapi.

Dari uraian diatas maka penulis bisa menarik kesimpulan untuk rata-rata tanggapan responden yang dikategorikan Baik adalah 3 orang atau 16 %, tanggapan responden kategori Cukup Baik adalah 6 orang atau 37%, dan

tanggapan responden yang menyatakan Kurang Baik adalah 8 atau 47%, berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebagian besar tanggapan responden tentang kompetensi petugas pemberi Pembangunan adalah Kurang Baik. Berdasarkan hasil Kuisisioner dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

“Maka hasil yang didapat terletak pada kategori Kurang Baik, karena menurut mereka kompetensi petugas masih minim dalam proses penyelesaian pembangunan ataupun dalam perencanaannya. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan yg sampai sekarang belum atau tidak terealisasi.”(hasil Kuisisioner tanggal 3 Oktober 2018)

Kesimpulan penulis terhadap ini, Masih ada pegawai yang belum terlalu paham mengenai Rencana Pembangunan di desa tersebut. Karna dalam proses pengerjaan maupun Pembangunannya masih kurang baik.

B.6 Ketepatan

Apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat, baik berupa Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung terselenggaranya suatu Pembangunan yang baik dan lancar. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pembangunan mencakup peralatan atau perlengkapan serta berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai maka proses Pembangunan dapat berlangsung tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengetahui Ketepatan dari ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pembangunan terkait Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011-2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V. 13 Distribusi Tanggapan Responden Unsur Desa tentang Ketepatan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dalam memberikan Pembangunan	2	1	4	7
2.	Fasilitas yang tersedia dalam memberikan Pembangunan	3	1	3	7
Jumlah		5	2	7	14
Rata-rata		2	1	4	7
Persentase		36%	14%	50%	100%

Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 7 responden pada item pertama tentang peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dalam memberikan Pembangunan yang menyatakan baik berjumlah 2 orang dengan alasan bahwa semua yang dibutuhkan sudah disediakan oleh Pemerintah. responden yang menjawab cukup baik berjumlah 1 orang dengan alasan yang sama, tetapi ada juga yang menjawab kurang baik berjumlah 4 orang dengan alasan banyak peralatan dan perlengkapan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sedangkan hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang mendorong untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaannya.

Selanjutnya Item kedua yaitu Fasilitas yang tersedia dalam memberikan Pembangunan dengan menjawab kategori baik berjumlah 3 orang dengan alasan bahwa ruang tunggu sudah disediakan untuk pemohon yang datang mengurus

sesuai dengan kebutuhannya, dalam kategori cukup baik menjawab berjumlah 1 orang dengan alasan yang sama. Tetapi ada juga responden yang menjawab kurang baik berjumlah 3 orang dengan alasan bahwa semua fasilitas yang tersedia untuk menunjang dalam memberikan Pembangunan sering kali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas maka penulis bisa menguraikan jawaban responden untuk Indikator Ketepatan per item-item yang telah dijelaskan maka bisa diperoleh nilai rata-rata Baik adalah 2 orang atau 36%, tanggapan responden yang terletak pada kategori Cukup Baik adalah 1 orang atau 14%, dan tanggapan responden yang terletak pada kategori Kurang Baik adalah 4 orang atau 50%. Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebagian besar tanggapan responden tentang Ketepatan dari Ketersediaan sarana dan prasarana Pembangunan yang tersedia dalam pembangunan Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah kategori Kurang Baik.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengatakan:

“Bahwa dimana ketepatan sasaran dari fasilitas, untuk Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Harapan Jaya Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang memang belum memadai.”(hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018)

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari Masyarakat tentang Ketepatan dari ketersediaan sarana dan prasarana dalam Pembangunan dapat dilihat tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V. 14 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Ketepatan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dalam memberikan Pembangunan	2	8	7	17
2.	Fasilitas yang tersedia dalam memberikan Pembangunan	3	4	10	17
Jumlah		5	12	17	34
Rata-rata		3	6	8	17
Persentase		15%	35%	50%	100%

Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 17 responden pada item pertama tentang peralatan dan perlengkapan kerja yang tersedia dalam memberikan Pembangunan yang menyatakan baik berjumlah 2 orang dengan alasan bahwa semua yang dibutuhkan sudah disediakan oleh Pemerintahan Desa sudah dipenuhi, Responden yang menjawab berjumlah 8 orang dengan kategori Cukup Baik dengan alasan bahwa peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan sudah cukup lengkap untuk melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi ada responden yang menjawab berjumlah 7 orang kategori Kurang Baik dengan alasan bahwa perlengkapan dan peralatan kerja yang dipergunakan masih kurang lengkap dan tertata rapi

Pada item selanjutnya yaitu fasilitas yang tersedia terletak pada kategori Baik 3 Orang dengan alasan ruang tunggu dan fasilitas penunjang lainnya sudah maksimal. yang menjawab cukup baik adalah 4 orang dengan alasan yang sama.

Tetapi ada responden yang menjawab kategori Kurang Baik sebanyak 10 orang dengan alasan masih banyaknya fasilitas ataupun peralatan yang kurang memadai.

Dari uraian diatas maka penulis bisa menguraikan jawaban responden untuk Indikator Ketetapan per item-item yang telah dijelaskan maka bisa diperoleh nilai rata-rata Baik adalah 3 orang atau 15%, tanggapan responden yang terletak pada kategori Cukup Baik adalah 6 orang atau 35%, dan tanggapan responden yang terletak pada kategori Kurang Baik adalah 8 orang atau 50%. Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebagian besar tanggapan responden tentang Ketepatan dari Ketersediaan sarana dan prasarana Pembangunan adalah kategori Kurang Baik. Berdasarkan hasil kuisioner dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

“Menurut mereka kecukupan waktu pembangunan dan kejelasan mengenai waktu yang diberikan belum jelas, sehingga desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengalami kesulitan dalam proses pembangunan, sehingga waktu yang dibutuhkan agak lama.(hasil kuisioner tanggal 3 Oktober 2018.)

Berdasarkan tanggapan responden melalui kuisioner serta penjelasan melalui wawancara sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka dapat dilakukan rekapitulasi mengenai Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, adapun tabel rekapitulasi terhadap responden pegawai terlihat pada tabel V.15 berikut :

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Unsur Desa Terhadap Proses Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Indikator Penelitian	Kategori Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	3	3	1	7
2	Efisiensi	2	4	1	7
3	Kecukupan	2	4	1	7
4	Pemerataan	5	1	1	7
5	Responsivitas	2	2	3	7
6	Ketepatan	2	1	4	7
Jumlah		16	15	11	42
Rata-rata		3	2	2	7
1		2	3	4	5
Persentase		38%	36%	26%	100%

(Sumber : olahan hasil penelitian penulis, 2018)

Dari rekapitulasi tanggapan responden Sekretaris Desa tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka tanggapan responden yang terletak pada kategori Baik adalah 3 orang atau 38%, tanggapan responden yang terletak pada kategori Cukup Baik 2 orang atau 36% dan tanggapan responden yang terletak pada kategori Kurang Baik adalah 2 orang atau 26%. Dengan demikian, sebagian besar tanggapan responden tentang

pelaksanaan Pembangunan adalah kategori Cukup Baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Terdapat hal-hal yang mempengaruhi dalam pemberian Pembangunan, itu dikarenakan pegawai/aparatur yang bertugas didalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 – 2016 di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sangat sedikit jumlahnya, dan tugas yang di atasi sangat banyak. Sehingga menjadikan proses Pembangunan menimbulkan masalah atau proses menjadi lamban., menyebabkan proses Pembangunan menjadi sangat terlambat. Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah bersama-sama dalam menyelesaikan proses Pembangunan tersebut, memberikan arahan kepada perangkat desa dalam penyelesaian tugas-tugasnya tersebut, karena dengan begitu upaya yang telah dilakukan oleh Sekretaris/Perangkat Desa memberikan dampak dan hasil yg baik bagi desa tersebut”.(Hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018.)



Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Indikator Penelitian	Kategori Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	4	9	4	17
2	Efisiensi	6	13	4	17
3	Kecukupan	4	8	6	17
4	Pemerataan	9	5	3	17
5	Responsivitas	3	6	8	17
6	Ketepatan	3	6	8	17
Jumlah		29	43	33	102
Rata-rata		5	7	5	17
Persentase		28%	42%	32%	100%

Sumber : olahan hasil penelitian penulis, 2018

Dari rekapitulasi tanggapan responden tentang Hasil Proses Pemberian Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka tanggapan responden yang terletak pada kategori Baik adalah 5 orang atau 28%, tanggapan responden yang terletak pada kategori Cukup Baik 7 orang atau 42% dan tanggapan responden yang terletak pada kategori Kurang Baik adalah 5 orang atau 32%. Dengan demikian, sebagian besar tanggapan responden tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan adalah kategori Cukup Baik. Berdasarkan hasil Observasi dengan responden mengenai Hasil Proses, beliau mengatakan:

“Pembangunan yang sudah diberikan oleh Pemerintahan Desa yang bertugas dalam Pembangunan sudah cukup berhasil, Pembangunan yang diberikan akan dapat segera terselesaikan apabila didalam Pembangunan tidak mengalami kendala-kendala.”(Hasil observasi tanggal 3 Oktober 2018.)

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala dalam Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Pembangunan publik dalam pengurusan surat rekomendasi Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada dasarnya bertujuan untuk membantu kelancaran Sekretaris Desa di segi Pembangunan. Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu, pihak kantor Desa Harapan Jaya Desa Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat memberikan Pembangunan yang baik dan lancar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses Pembangunan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan turunnya pagu indikatif sehingga menghambat proses RKPDes.

2. Waktu yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, hal tersebut menyebabkan Pembangunan lainnya menjadi terhambat dan tidak sesuai waktunya.
3. Belum maksimalnya koordinasi Camat dengan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pengkalan Kuras terutama terkendalanya realisasi anggaran untuk pembangunan.



BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan judul Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan 2 tujuan penelitian dengan menggunakan 4 kategori indikator yaitu :

1. Kesimpulan untuk **indikator Efektivitas** apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 -2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan“ berdasarkan hasil Kuisisioner, Wawancara, dan Observasi, tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawandinilai **Cukup Baik** dengan persentase 38% dari jumlah responden yang berjumlah 24 orang.

- Karena dari hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018, menurut mereka Pembangunan yang diberikan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal atau kendala mengenai waktu penyelesaiannya yang tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

2. Kesimpulan untuk **indikator Efisiensi** seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawantersebut berdasarkan Kuisioner, wawancara dan Observasi serta analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawandinilai **Cukup Baik** dengan persentase 41% dari jumlah responden yang berjumlah 24 orang.

- Karena dari hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018, dapat dilihat bahwa dalam pembangunan yang direncanakan tersebut, masih terdapat kesalahan dalam pengerjaannya ataupun dalam melengkapi syarat2 pengajuan Perencanaan Pembangunan di desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tersebut.

3. Kesimpulan untuk **indikator Ketepatan** apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat. Dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 –

2016 di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, berdasarkan kuisisioner, wawancara, observasi dan analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Ketepatan dari Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 41% dari jumlah responden yang berjumlah 24 orang.

- Karena dari hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018, hasil yang didapat terletak pada kategori **Cukup Baik**, menurut mereka hasil yang dicapai memiliki manfaat jika unsur-unsur penting yang mendukung terselenggaranya suatu pembangunan di desa tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

4. Kesimpulan untuk indikator **Responsivitas** apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 - 2016 Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka **disimpulkan Kurang Baik** meskipun jumlah respon terbanyak pada **kurang baik** untuk kategori kuisisioner dengan jumlah persentase 38% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 24 orang responden.

- Karena dari hasil wawancara tanggal 3 Oktober 2018, menurut mereka kompetensi petugas masih minim dalam proses penyelesaian pembangunan ataupun dalam perencanaannya. Karena masih banyak

masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan yg sampai sekarang belum atau tidak terealisasi.

5. Kemudian penulis merekap kesimpulan dari keseluruhan indikator yang mana 3 indikator yaitu, Efektivitas, Efisiensi dan Kecukupan yang tersimpulkan pada kategori **Cukup Baik**. Kemudian indikator Responsivitas dan Ketepatan terletak pada kategori **Kurang Baik**. Selanjutnya pada indikator Pemerataan pada kategori **Baik**.

Penulis berupaya menganalisis baik dari kuisisioner, wawancara, dan observasi ke 4 indikator dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 16 dengan persentase 41%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 2011 – 2016 di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dinilai **Cukup Baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

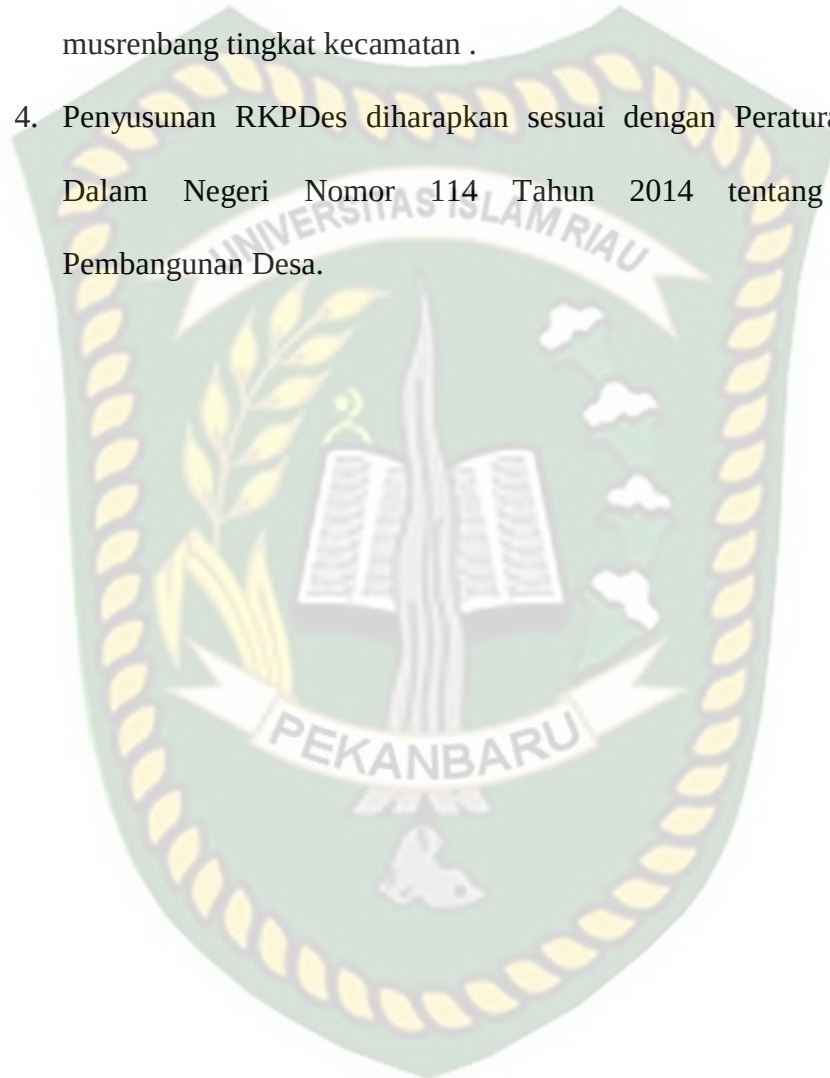
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan sebagai saran Pemerintah Daerah lebih Produktif lagi untuk datang lebih tepat sesuai pada waktu yang ditentukan untuk masing - masing desa.
2. Terkait Peraturan Bupati Pelalawan hendaknya ada keterangan yang jelas untuk pihak kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa se-kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawanterutama bidang Pembangunan.

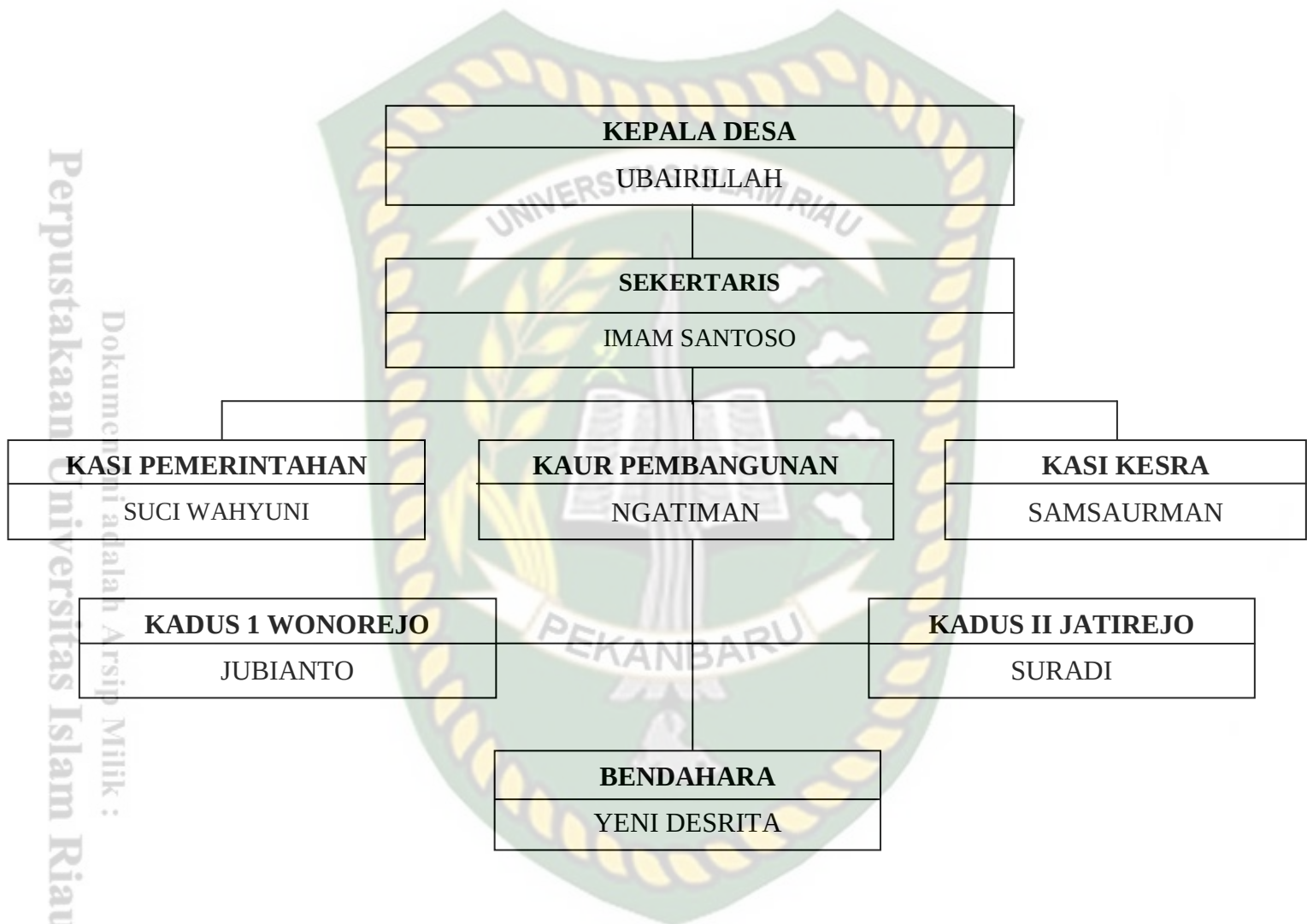
3. Diharapkan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa dan musrenbang tingkat kecamatan .
4. Penyusunan RKPDes diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



STRUKTUR ORGANISASI

DESA HARAPAN JAYA KEC. PANGKALAN KURAS KABUPATEN

PELALAWAN



LAMPIRAN 1 : DOKUMENTASI PENELITIAN



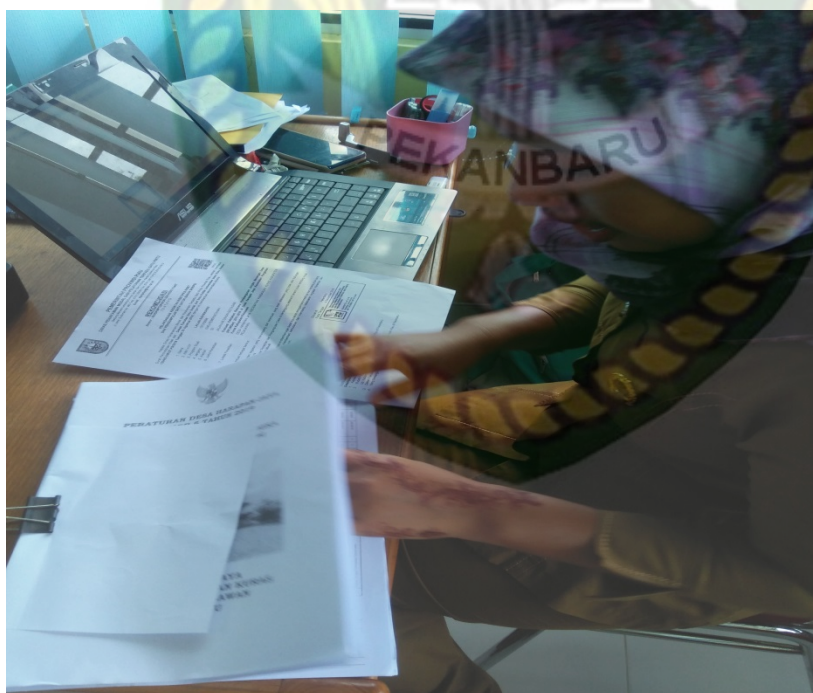
Gambar 1 : Foto salah satu Perangkat Desa Harapan Jaya



Gambar 2 : Foto Bersama Perangkat Desa di Desa Harapan Jaya.



Gambar 3 : Foto Bersama Bapak Imam Santoso di Kantor Camat Pelalawan.



Gambar 3 : Foto Bersama Kaur Perencanaan di Kantor Desa Harapan Jaya



Gambar 4 : Foto Masyarakat di Desa Harapan Jaya



Gambar 5 : Foto Masyarakat di Desa Harapan Jaya



Gambar 6: Foto Kantor Desa Harapan Jaya



Gambar 7 : Lokasi atau Jalan Menuju Desa Harapan Jaya



Gambar 8 : Jalan Penghubung Menuju Desa Sialang Indah



Gambar 9 : Mesjid Jami' Baiturrahman Harapan Jaya



Gambar 10 : MTS Manbaul Ulum Harapan Jaya



Gambar 11 : Rukanbabinkantibnas Harapan Jaya



Gambar 13 : Keadaan Jalan yang Belum Di Aspal Desa Harapan Jaya



Gambar 14 : Kondisi Jalan dan Drainase yang Belum Selesai

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU:

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan publik*. Yayasan pancur siwah, Jakarta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Andi Yusran, Husnu Abadi. 2008. *Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial*, Red Post Press, Pekanbaru
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Erly Suandy, 2001. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hadi, Triono. 2014. *Perencanaan Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Desa (Membangun Desa dan Desa Membangun)*, Fitra Provinsi Riau.
- Hamim, Sufian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*, Pekanbaru: UIR Press
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Lukman Offset dan YPAPI. Yogyakarta.
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- iIsmail, Maiminah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur
- Koryati, NyimasDwi, DKK 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI, Yogyakarta

- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri Desa Membangun*, Kementrian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,
Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*". PT Raja Grafindo
Persada.
- Kusnadi, 2005. *Pengantar Manajemen*. Unibraw Press, Malang
- Labolo, Muhadam, 2010. "*Memahami Ilmu Pemerintahan* ", Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada.
- Lester, James P., Josep Steward. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*,
Belmont: Wadsworth.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Moeleong, Lexy, 2005, *Penelitian Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Musanef, 1998. *System Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2011. *Kybernologi I (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta. Jakarta
- _____, 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
Rineka Cipta. Jakarta
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Alfabet
- Pattilima, Sukandar, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Bumi Aksara
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan (ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan)*
Jakarta, PT, Warsit Watampoe
- Rumidi, Sukandar, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

- Sedarmayanti, 2004, *Good governance*, Bandung, MandarMaju
- Silahuddin, M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementrian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,
Jakarta.
- Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa
Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press. Jakarta.
- Siagian, Sondang P.2002. *Teori Pengembangan Organisasi*.Jakarta:Bumi Aksara
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:
PustakaPelajar.
- Sufian,2003. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. UIR PRESS.Pekanbaru
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010.*Ilmu Politik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika
Ditama.
- Syafarin, Jubaedah, 2005, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, PustakaSetia Bandung
- Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Djambatan. Jakarta.
- Thoha, Miftah,1999. *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta
- _____, 2011. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Akasara,
Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara*. PT. BumiAksara, Jakarta

- _____ 2008. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. PT. Danar Wijaya, Malang.
- Wahyudi, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*, IPDN Press, Bandung.
- Wibawa, Samodra, 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Widjaya, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja GrafindoPersada
- _____ 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, Raja GrafindoPersada
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. GrafindoPersada. Jakarta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus (Edisi Revisi Terbaru)* PT Buku Seru. Jakarta.
- Wrihatnolo, Randy R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Gramedia
- Yogia, Moris Adidi. 2014. *Tinjauan Teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Perkebunan*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru
- Zulkifli, 2015. *Pengantar Manajemen*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- _____ 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR, Pekanbaru

B. Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Desa Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.